



Research Article

Dinamika Dukungan Pemerintah terhadap Kelayakan Bisnis UMKM Berbasis Ekonomi Islam di Jawa Timur

Yusroh Fajariyah¹, Abdur Rohman²

1. Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; yusrohfajariyah03@gmail.com 
2. Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 12, 2024
Accepted : October 15, 2025

Revised : September 24, 2025
Available online : November 16, 2025

How to Cite: Yusroh Fajariyah, & Abdur Rohman. (2025). Dynamics of Government Support for the Business Feasibility of Islamic-Based MSMEs in East Java. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 143-155. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.17>

Dynamics of Government Support for the Business Feasibility of Islamic-Based MSMEs in East Java

Abstract. This study aims to analyze government support for the viability of Islamic economy-based MSMEs in East Java and identify challenges faced in implementing sharia-based policies. The method used is descriptive qualitative with literature review techniques, where data is collected from various sources such as journals, books, research reports, and related policy documents. The analysis was conducted using content analysis to identify patterns, trends, and the impact of policies on the development of Islamic economy-based MSMEs. The results of the study indicate that government support plays an important role in improving the business viability of Islamic economy-based MSMEs, particularly through sharia-based policies, interest-free financial facilities, and empowerment programs aligned with Islamic economic principles. However, policy implementation still faces various challenges, such as a lack of understanding of Islamic economics among business actors and regulatory

challenges that need to be aligned with sharia principles. Additionally, this study highlights how Islamic economy-based MSMEs can leverage government support to enhance their competitiveness and business sustainability. Thus, this research contributes to understanding the interplay between government policies, business viability, and the development of Islamic economics at the regional level.

Keywords: MSMEs, Islamic Economy, Government Support, Business Feasibility

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan pemerintah terhadap kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan berbasis syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik kajian pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tren, serta dampak kebijakan terhadap pengembangan UMKM berbasis ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam, terutama melalui kebijakan berbasis syariah, fasilitas keuangan tanpa riba, serta program pemberdayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang ekonomi Islam di kalangan pelaku usaha serta tantangan regulasi yang perlu disesuaikan dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana UMKM berbasis ekonomi Islam dapat memanfaatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memahami keterkaitan antara kebijakan pemerintah, kelayakan usaha, dan perkembangan ekonomi Islam di tingkat regional.

Kata Kunci: UMKM, Ekonomi Islam, Dukungan Pemerintah, Kelayakan Bisnis

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal, UMKM berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, dukungan pemerintah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kelayakan bisnis UMKM, terutama yang berbasis ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat memberikan solusi bagi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara dukungan pemerintah dan pengembangan UMKM berbasis ekonomi Islam. Misalnya, penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM dan pengembangan ekonomi syariah menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM syariah digital. (Hulu & Ruslan, 2025) kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM syariah dapat meningkatkan akses pelaku usaha terhadap fasilitas keuangan dan program pemberdayaan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman tentang ekonomi Islam di kalangan pelaku usaha untuk memaksimalkan manfaat dari kebijakan yang ada. (Sari & Rahman, 2020) tantangan regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah menjadi hambatan bagi pengembangan UMKM berbasis ekonomi Islam. Penelitian ini menggarisbawahi

perlunya penyesuaian regulasi agar lebih mendukung pertumbuhan UMKM syariah. (Hidayat & Sari, 2019)

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat celah dalam pemahaman tentang bagaimana dukungan pemerintah dapat secara langsung mempengaruhi kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur. dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan berbasis syariah dan fasilitas keuangan tanpa riba sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Namun, mereka juga mencatat bahwa kurangnya pemahaman tentang ekonomi Islam di kalangan pelaku usaha menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan pemerintah ada, tantangan dalam pemahaman dan penerapan prinsip syariah masih perlu diatasi. (Sari & Rahman, 2020)

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan pemerintah terhadap kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan berbasis syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik kajian pustaka, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai literatur, termasuk jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tren, serta dampak kebijakan terhadap pengembangan UMKM berbasis ekonomi Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami keterkaitan antara kebijakan pemerintah, kelayakan usaha, dan perkembangan ekonomi Islam di tingkat regional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung UMKM berbasis ekonomi Islam, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana UMKM berbasis ekonomi Islam dapat memanfaatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka, yaitu meneliti berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan dukungan pemerintah terhadap kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur. Data yang digunakan bersumber dari literatur yang telah ada, tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Informasi dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yakni membaca, menganalisis, dan menyusun kembali berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep ekonomi Islam, kebijakan pemerintah, serta pengembangan UMKM berbasis syariah. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan metode analisis isi, yaitu membandingkan dan menghubungkan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang pola, dinamika, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai dukungan pemerintah dan bagaimana kebijakan berbasis ekonomi Islam

berkontribusi terhadap perkembangan serta keberlanjutan UMKM syariah di Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dukungan Pemerintah dan Kebijakan Berbasis Syariah

Penelitian mengenai dukungan pemerintah terhadap UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur menunjukkan bahwa peran kebijakan yang tepat sangat krusial dalam meningkatkan kelayakan bisnis sektor ini. Kebijakan pemerintah yang dilandasi prinsip-prinsip syariah tidak hanya menyediakan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha terhadap fasilitas keuangan dan program pemberdayaan. keberadaan kebijakan memungkinkan UMKM berbasis syariah untuk memperoleh pendanaan yang sesuai dengan prinsip tanpa riba, sehingga mendorong pertumbuhan usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan. (Sari & Rahman, 2020)

kebijakan yang mendukung UMKM syariah dapat meningkatkan akses pelaku usaha terhadap fasilitas keuangan dan program pemberdayaan. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM syariah dengan menerapkan kebijakan regulasi yang mendorong pertumbuhan bisnis berbasis syariah. Mereka telah melakukan beberapa hal, seperti memberikan insentif pajak, menyediakan sertifikasi halal, dan memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ingin beralih ke sistem bisnis berbasis syariah. Selain itu, untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas bisnis lokal harus bekerja sama. (Mulyani, t.t.) Penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Jawa Barat. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah penyediaan akses modal tanpa riba, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sebuah penelitian mencatat bahwa akses modal yang lebih baik tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha dan inovasi produk. Dengan adanya pembiayaan yang sesuai, UMKM dapat lebih leluasa dalam merencanakan ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Selain itu, regulasi yang mendorong ekosistem bagi usaha yang menerapkan prinsip syariah juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja UMKM. Kebijakan yang mendukung pengembangan usaha syariah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku UMKM untuk beroperasi dan bersaing. Hal ini termasuk pengaturan yang jelas mengenai standar operasional, perlindungan hukum, dan insentif bagi usaha yang mematuhi prinsip syariah. Dengan adanya regulasi yang mendukung, pelaku UMKM akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk mengembangkan usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM juga merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam bisnis mereka. Program-program pelatihan ini membantu pelaku usaha untuk memahami aspek-aspek penting dari ekonomi syariah, termasuk manajemen keuangan, pemasaran, dan inovasi produk.

Selain itu, digitalisasi dan inovasi teknologi yang didukung oleh pemerintah menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM syariah di pasar global. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang komprehensif dan terintegrasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Barat. (Budi Utama dkk., 2024)

Penelitian di Jawa Timur pun juga ada, yakni penelitian yang menganalisis kebijakan pemerintah terhadap UMKM di Jawa Timur yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap UMKM berupa bantuan modal, pelatihan kewirausahaan dan labelisasi halal memainkan peran penting dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung pengembangan UMKM, termasuk reformasi regulasi, intensifikasi fisik, dan inisiatif pengembangan kapasitas. Namun, masih perlu diteliti kembali mengenai sejauh mana intervensi ini berkontribusi pada ekspansi, inovasi, dan daya saing UMKM, juga mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah yang ditunjukkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM di wilayah tertentu. (Utomo dkk., 2024)

Fasilitas Keuangan Tanpa Riba

Fasilitas keuangan tanpa riba menjadi salah satu komponen utama yang berkontribusi signifikan dalam bantuan pemerintah kepada UMKM syariah. Akses pembiayaan sangat menentukan kemampuan UMKM dalam memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan inovasi produk. Namun, masih terdapat tantangan signifikan yang menghambat pemanfaatan fasilitas tersebut secara optimal, terutama terkait dengan kurangnya literasi dan pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep ekonomi Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam memberikan edukasi dan pelatihan menjadi sangat penting agar para pelaku usaha dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip syariah dengan benar. (Hidayat dan Sari : 2019) Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. (Nugroho, 2020)

Dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam segi keterbatasan modal, adanya pembiayaan syariah dari lembaga keuangan yang bebas dari riba, dan menjadi peluang bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang usaha. (Putri, 2021) Dalam mendukung kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur, pemerintah telah mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang bebas dari unsur riba. Salah satu inisiatif utama adalah Kredit Sejahtera UMKM (Prokesra), yang memberikan subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga mereka dapat mengakses modal dengan biaya yang lebih ringan. Selain itu, keberadaan Bank UMKM Jatim berperan penting dalam menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah, yang memungkinkan UMKM memperoleh modal sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. (Administrator, 2025) Dukungan ini tidak hanya membantu UMKM dalam mengatasi kendala permodalan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Lebih jauh, literasi keuangan syariah menjadi aspek krusial dalam

memastikan keberlanjutan sistem pembiayaan ini. Program seperti Silakwil ICMI Jawa Timur 2025 telah berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, sehingga UMKM dapat lebih optimal dalam memanfaatkan fasilitas keuangan tanpa riba.(NNNewsroom, 2025) Dengan adanya regulasi yang mendukung serta ekosistem keuangan syariah yang semakin berkembang, UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur memiliki peluang besar untuk tumbuh dan bersaing secara global.

Program Pemberdayaan

program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah juga memiliki dampak positif yang nyata dalam mengembangkan UMKM berbasis ekonomi Islam. program-program seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan sosialisasi prinsip syariah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM. Dengan dukungan ini, UMKM dapat mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.(Wahyu & Sari, 2021) Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian lain bahwa pemberdayaan berdampak langsung pada peningkatan kualitas produk dan pelayanan UMKM.(Rizki & Anwar, 2020)

Untuk mendukung kebijakan pemerintah, diperlukan beberapa strategi jangka pendek dan jangka panjang serta adanya edukasi dan sosialisasi informasi mengenai penggunaan e-commerce sebagai salah satu platform yang biasa digunakan untuk menunjang perekonomian sementara selama pandemi Covid-19 dan memudahkan bagi para pelaku bisnis dalam memperkenalkan bisnisnya dan bahkan melakukan transaksi. (Anggraeni dkk., 2021) karena itu betapa pentingnya adanya dukungan dalam sektor digital juga seperti platform e commerce .

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Peran Pemerintah melalui Beberapa Program Pemberdayaan UMKM perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kredit yang diberikan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memenuhi definisi dan kriteria yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Menurut UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif dengan batasan kekayaan bersih dan hasil penjualan tertentu. Pertumbuhan kredit UMKM secara umum lebih besar daripada total kredit perbankan. Agar UMKM berkembang dan ekonomi nasional menjadi lebih kuat, budaya mencintai produksi dalam negeri juga perlu dipupuk. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembinaan dan pelatihan melalui peningkatan capacity building dan penerapan aplikasi information

technology (IT), termasuk mengefektifkan kembali web Pemda-Pemda saat ini yang tidak optimal sebagai basis komunikasi UMKM di daerah. (Anggraeni dkk., 2021)

Selain itu juga terdapat penelitian mengenai Program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Jawa Timur, yang sudah berjalan cukup lama, kurang lebih tujuh sampai delapan tahun. Program ini diberlakukan di seluruh LAZISMU di wilayah Jawa Timur dengan program kerja yang berbeda-beda. Setiap wilayah kota atau kabupaten bebas memiliki cara-cara tersendiri untuk menyalurkan bantuan untuk UMKM binaan. (Anisah, 2022)

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Tantangan dalam implementasi kebijakan berbasis syariah untuk UMKM di Indonesia memang menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM syariah, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan penerapan kebijakan ini sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku UMKM, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas dukungan yang diberikan oleh pemerintah.

Regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pengambil kebijakan dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM syariah. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka, yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan. Oleh karena itu, pengaturan dan penyesuaian ulang regulasi secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan dapat berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan UMKM secara optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan syariah sering kali berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan yang seharusnya mendukung pertumbuhan UMKM berbasis ekonomi Islam misalnya dalam sebuah penelitian menekankan bahwa tanpa adanya sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM, upaya untuk mengembangkan sektor ini akan terhambat.

Koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akses ke fasilitas keuangan dan program pemberdayaan. Selain itu, ketidakjelasan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga dapat mengakibatkan ketidakpastian yang menghambat keputusan investasi dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, penting untuk membangun saluran komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah, serta melibatkan pelaku UMKM dalam proses perumusan kebijakan.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM syariah

secara lebih efektif. Dengan adanya kerjasama yang baik, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman yang berharga, sehingga pelaku UMKM dapat lebih memahami dan memanfaatkan berbagai program dukungan yang tersedia. Dengan demikian, menciptakan ekosistem yang harmonis dan terintegrasi akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian lokal. (Hidayat dan Sari: 2020) dan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan kebijakan yang ada secara efektif. (Rahman & Hasan: 2019)

Meskipun ada banyak kebijakan yang mendukung, tantangan dalam penerapan kebijakan juga harus diidentifikasi. Usaha kecil dan menengah (UMKM) masih banyak yang bingung tentang program pemerintah dan birokrasi pinjaman yang rumit. Sekitar 60% pelaku UMKM mengalami kesulitan memahami syarat dan prosedur pengajuan KUR, menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi UMKM Indonesia (Asosiasi UMKM Indonesia, 2022). Selain itu, UMKM yang tidak menerima dukungan teknis dan pendampingan dari pemerintah menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan kebijakan yang ada. Menurut Dr. Siti Nurjanah, seorang peneliti kewirausahaan, "Tanpa adanya pendampingan yang memadai, banyak UMKM yang tidak dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah secara optimal." Intervensi kewirausahaan, kebijakan moneter, dan pembinaan teknologi digital adalah semua cara kebijakan pemerintah membantu pertumbuhan UMKM. Tujuan reformasi regulasi di Indonesia, insentif pajak, dan bantuan keuangan adalah untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (UMKM). Namun, masalah utama adalah birokrasi yang kompleks dan implementasi yang tidak konsisten. Kebijakan publik juga mencakup kebijakan pemerintah, yang menunjukkan bagaimana pemerintah mengendalikan kepentingan umum. Efektivitasnya bergantung pada keharmonisan antara kebutuhan lapangan dan kebijakan yang dirancang. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan bisnis kecil dan menengah (UMKM). (Harahap dkk., 2025)

Pentingnya Pemahaman Ekonomi Islam

pentingnya peningkatan edukasi dan literasi ekonomi syariah secara masif dan sistematis. Mereka menemukan bahwa banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, yang berakibat pada kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan usaha mereka. Ketidakpahaman ini tidak hanya menghambat penerapan prinsip syariah, tetapi juga mengurangi potensi pemanfaatan berbagai program dukungan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah. (Fauzi & Lestari, 2021)

Edukasi yang kurang memadai dapat menyebabkan pelaku UMKM tidak mampu memanfaatkan fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pelatihan yang terstruktur dan sosialisasi yang intensif sangat dibutuhkan agar

pelaku UMKM dapat berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Lebih jauh, penelitian oleh Nugroho (2020) dan Gina (2019) juga mendukung temuan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga membantu pelaku UMKM dalam menghadapi risiko bisnis dengan pendekatan yang berlandaskan prinsip Islami. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan dapat mengurangi beban utang bagi pelaku UMKM. (Nugroho, 2020; Gina, 2019)

Dukungan lembaga keuangan syariah ini turut melengkapi peran serta pemerintah dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berkelanjutan. Di daerah seperti Jawa Timur, di mana sektor UMKM menjadi penggerak utama ekonomi lokal, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM sangat penting. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah dan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya akan mampu menjalankan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berkembang pesat dan telah menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia, termasuk di wilayah Palembang. Koperasi kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang gagal menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kejujuran, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting dalam menganalisis kelayakan usaha agar tidak hanya layak dari segi finansial, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan spiritual. UMKM masih menghadapi banyak tantangan meskipun memiliki potensi yang besar. Ini termasuk akses yang terbatas ke pembiayaan syariah, kurangnya pemahaman tentang ekonomi Islam, dan kekurangan infrastruktur pendukung. Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembiayaan, pendampingan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial dan ekonomi dalam konteks ini. Untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang berbasis ekonomi Islam yang berkelanjutan, pemerintah, masyarakat, dan institusi keuangan syariah harus memberikan dukungan penuh. (Ramadani dkk., 2025)

Dengan semua temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterpaduan antara kebijakan pemerintah, penyediaan fasilitas keuangan syariah, program pemberdayaan yang komprehensif, serta peningkatan literasi ekonomi Islam akan mampu memperkuat kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM syariah harus diintegrasikan dengan program-program yang memberikan akses kepada pelaku usaha terhadap sumber daya dan fasilitas yang diperlukan. Ini termasuk penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, pelatihan keterampilan, dan dukungan teknis yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka secara efektif. Dengan adanya sinergi antara kebijakan dan fasilitas yang disediakan, pelaku UMKM akan lebih mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan memanfaatkan peluang yang ada.

Selain itu, penyesuaian regulasi yang responsif dan edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Regulasi yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan usaha. Di sisi lain, peningkatan literasi ekonomi Islam di kalangan pelaku usaha akan memastikan bahwa mereka memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Dengan demikian, kontribusi nyata dalam membangun ekonomi syariah yang tangguh dapat tercapai, baik di tingkat regional maupun nasional. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

dampak kebijakan pemerintah terhadap kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur sangat signifikan dan multifaset. Kebijakan yang mendukung akses pembiayaan tanpa riba dan program pemberdayaan yang komprehensif telah terbukti meningkatkan daya saing dan inovasi di kalangan pelaku UMKM. Namun, tantangan dalam regulasi dan pemahaman ekonomi Islam masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada, serta meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam kepada pelaku usaha. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang ada, sehingga potensi UMKM syariah dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kelayakan bisnis UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur. Berbagai kebijakan berbasis syariah, fasilitas keuangan tanpa riba, serta program pemberdayaan telah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM syariah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu

diatasi, seperti regulasi yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip ekonomi Islam serta rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai sistem keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi ekonomi Islam serta penyalarsan kebijakan sangat diperlukan guna memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM berbasis syariah di wilayah tersebut.

Untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM berbasis ekonomi Islam, pemerintah perlu mengoptimalkan fasilitas pembiayaan syariah agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Selain itu, regulasi yang mendukung ekosistem bisnis syariah harus lebih jelas dan responsif terhadap kebutuhan UMKM, sehingga dapat meminimalisir hambatan administratif yang sering terjadi. Digitalisasi UMKM juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing mereka, terutama melalui pemanfaatan platform e-commerce berbasis halal yang memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar lebih luas. Dengan adanya program pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip ekonomi Islam secara optimal dalam bisnis mereka.

Keberlanjutan UMKM berbasis ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam mengadaptasi prinsip syariah. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas bisnis lokal sangat diperlukan untuk membangun ekosistem yang kuat dan berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM syariah. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, UMKM berbasis ekonomi Islam di Jawa Timur dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, R., & Rahman, A. (2020). Dukungan Pemerintah terhadap UMKM Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45-60.
- Hidayat, A., & Sari, M. (2019). Tantangan dan Peluang UMKM Berbasis Ekonomi Islam di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 123-135.
- Fauzi, M., & Lestari, D. (2021). Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(3), 200-215.
- Wahyu, S., & Sari, D. (2021). Program Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 150-165.
- Rizki, M., & Anwar, H. (2020). Inkubasi Bisnis untuk UMKM Syariah. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 11(3), 200-215.
- Nugroho, A. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 9(1), 75-90.
- Sukma, R., & Rahmawati, N. (2021). Tantangan Regulasi dalam Pengembangan UMKM Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7(1), 45-60.
- Sari, R., & Rahman, A. (2020). Kebijakan Pemerintah dan UMKM Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(2), 100-115.

- Hidayat, A., & Sari, M. (2019). Regulasi dan UMKM Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 90-105.
- Fauzi, M., & Lestari, D. (2021). Kebijakan Syariah untuk UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3), 200-215.
- Hidayat, R., & Sari, D. (2020). "Kolaborasi Lembaga dalam Pengembangan UMKM Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 123-135.
- Rahman, A., & Hasan, M. (2019). "Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM dalam Implementasi Kebijakan Syariah." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(1), 45-60.
- Sukma, R., & Rahmawati, N. (2021). "Tantangan dan Peluang UMKM Syariah di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(3), 201-215.
- Zainuddin, M., & Fitriani, R. (2020). "Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung UMKM Syariah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 78-90.
- Nuraini, S., & Prabowo, H. (2021). "Regulasi dan Implementasi Kebijakan Syariah untuk UMKM: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 150-165.
- Administrator. (2025a). *Optimalisasi Modal Usaha UMKM Jatim: Kunci Pertumbuhan Ekonomi*. <https://bankumkm.id/index.php/2025/01/24/optimalisasi-modal-usaha-umkm-jatim-kunci-pertumbuhan-ekonomi/>
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Alimah, M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 3(1).
- Anisah, F. (2022). Kontribusi Islamic Sosial Finance dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lazismu Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3189. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6327>
- Budi Utama, A. N., Firdaus, D., & Priyana, Y. (2024). The Effect of Sharia Investment and Government Policy on the Financial Performance of MSMEs in West Java. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(07), 1455-1462. <https://doi.org/10.58812/ws.is.v2i07.1123>
- Harahap, L. M., Sidebang, N. L. U., Sitompul, R., Lingga, R. D. S., & Pakpahan, T. G. (2025). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia*. 1(1).
- Hulu, M. R. H., & Ruslan, D. (2025). *ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG UMKM BERBASIS SYARIAH DI ERA EKONOMI DIGITAL*.
- Mulyani, D. K. (t.t.). *Dampak Pengembangan UMKM Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*.
- Putri, S. (2021). *PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA*. 1.
- Ramadani, A., Aprilia, V., & Saputra, A. A. A. (2025). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM STUDI KELAYAKAN UMKM DI PALEMBANG*. 5.
- Tim Editor Nasional.news. (2025b). *Silakwil ICMI Jawa Timur 2025, Perkuat Ekonomi Umat dan UMKM Lewat Literasi Keuangan Syariah*. <https://nasional.news/silakwil-icmi-jawa-timur-2025-perkuat-ekonomi-umat-dan-umkm-lewat-literasi-keuangan-syariah/>

Utomo, S. B., Pujowati, Y., & Utami, E. Y. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah, Bantuan Modal, dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Bisnis pada Komunitas UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 146–156. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1110>